

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah negara besar yang memiliki banyak potensi untuk menjadi negara yang makmur. Potensi-potensi tersebut antara lain sumber daya alam yang melimpah, wilayah kepulauan yang strategis, sumber daya manusia yang melimpah dan masih banyak lagi. Tentunya, dalam membangun negara guna mencapai kemakmuran memerlukan sistem pengelolaan sumber dana yang baik. Pengelolaan tersebut berkaitan dengan penghasilan negara. Salah satu penghasilan negara berasal dari pemungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar. Hal tersebut terjadi karena salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sehingga pemerintah mengharapkan proporsi yang besar dari pemasukan berupa pajak.

Perpajakan di Indonesia sendiri menurut pemungut dan pengelolanya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat terdiri dari 4 (empat) jenis pajak. Sedangkan pajak daerah terdiri dari 16 (enam belas) jenis pajak yang dibagi menjadi 5 (lima) Pajak provinsi dan 11 (sebelas) pajak kabupaten/kota.

Salah satu jenis pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pemerintah provinsi (daerah) memerlukan sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan penarikan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring berjalannya waktu, pengguna kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor secara cepat dan responsif maka dikembangkanlah sistem penarikan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru yaitu SAMSAT sistem *Drive Thru* atau sistem cepat yang menggunakan teknologi *online* internet.

Layanan SAMSAT *Drive Thru* merupakan salah satu bentuk perbaikan pelayanan di kantor SAMSAT kota Padang, dimana ditujukan kepada wajib pajak yang hendak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dilaksanakan di luar kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan hanya membutuhkan waktu transaksi kurang lebih 5 (lima) menit. Layanan *Drive Thru* juga dilakukan untuk memutuskan mata rantai operasi para calo Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah marak dan berkeliaran di sekitar kantor SAMSAT. Selain itu, layanan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun ketahun. Namun sistem pelayanan SAMSAT *Drive Thru* yang dilakukan untuk upaya pengembangan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di kota Padang masih tergolong asing oleh wajib pajak. Untuk itu dibutuhkan pengenalan dan penilaian untuk mengukur hasil kerja atau suatu proses lanjutan setelah mendapat kanhasil dari apa yang dikerjakan berjalan baik atau tidak, yang dikerjakan mencapai apa yang diinginkan atau tidak, dan dengan evaluasi ini dapat mengambil keputusan untuk kedepannya (Faisal Reza Nasution : 2015). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dalam menyusun tugas akhir mengambil judul : “EVALUASI PENARIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SISTEM *DRIVE THRU* DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA PADANG”.

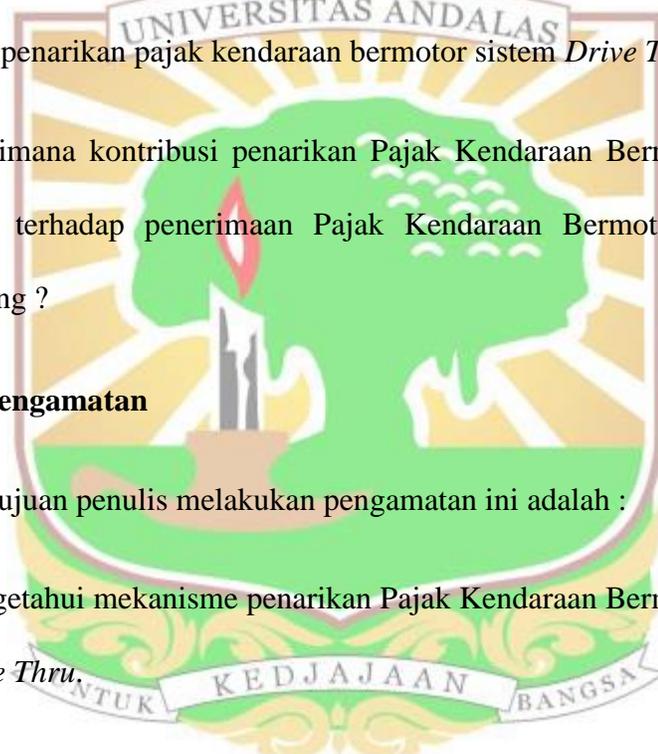
## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem *Drive Thru* ?
2. Apa saja kendala penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem *Drive Thru* ?
3. Solusi apa yang perlu diberikan untuk menyelesaikan kendala yang terjadi pada penarikan pajak kendaraan bermotor sistem *Drive Thru* ?
4. Bagaimana kontribusi penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem *Drive Thru* terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT kota Padang ?

## 1.3 Tujuan Pengamatan

Adapun tujuan penulis melakukan pengamatan ini adalah :

1. Mengetahui mekanisme penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sistem *Drive Thru*.
2. Mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sistem *Drive Thru*.
3. Mengetahui gambaran solusi agar pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sistem *Drive Thru* dapat berjalan lancar.



4. Mengetahui apakah pelaksanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sistem *Drive Thru* memberi kontribusi yang berarti bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) SAMSAT kota Padang.

#### 1.4 Metode Pengamatan

##### 1. Desain Pengamatan

Dalam tugas akhir ini menggunakan desain pengamatan berupa observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sistem *Drive Thru* kota Padang dan melakukan wawancara dengan wajib pajak yang melakukan pembayaran maupun petugas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

##### 2. Objek Pengamatan

Objek pengamatan adalah mekanisme penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sistem *Drive Thru* di SAMSAT kota Padang. Beberapa alat bantu yang digunakan dalam teknik ini adalah penggunaan gambar/foto untuk memperjelas deskripsi. Objek pengamatan yang berupa masalah akan diteliti dan dibahas untuk mencari solusi penyelesaian.

##### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari wawancara, data sekunder yang didapat dari pemeriksaan dokumen SAMSAT atau buku-

buku referensi lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen perusahaan.

## 1.5 Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Pengamat melakukan pengamatan langsung dalam mengamati dan mengumpulkan data dari responden dengan melakukan wawancara dengan petugas penarik dan pembayaran SAMSAT *Drive Thru* serta wawancara dengan wajib pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

### 2. Dokumentasi

Sumber data dokumentasi untuk memperoleh data langsung di kantor bersama SAMSAT kota Padang yang meliputi laporan kegiatan berupa laporan keuangan dan non keuangan, buku serta peraturan yang relevan.

## 1.6 Teknik Pembahasan

Teknik pembahasan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Faisal Reza Nasution : 2015 ) dimana hanya mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau pengungkapan fakta mengenai persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor SAMSAT kota Padang.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini dibagi atas 5 (lima) bab dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang menjadi satu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dengan rincian sebagai berikut :

### BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan pengamatan, metode pengamatan, teknik pengumpulan data, teknik pembahasan dan sistematika penulisan.

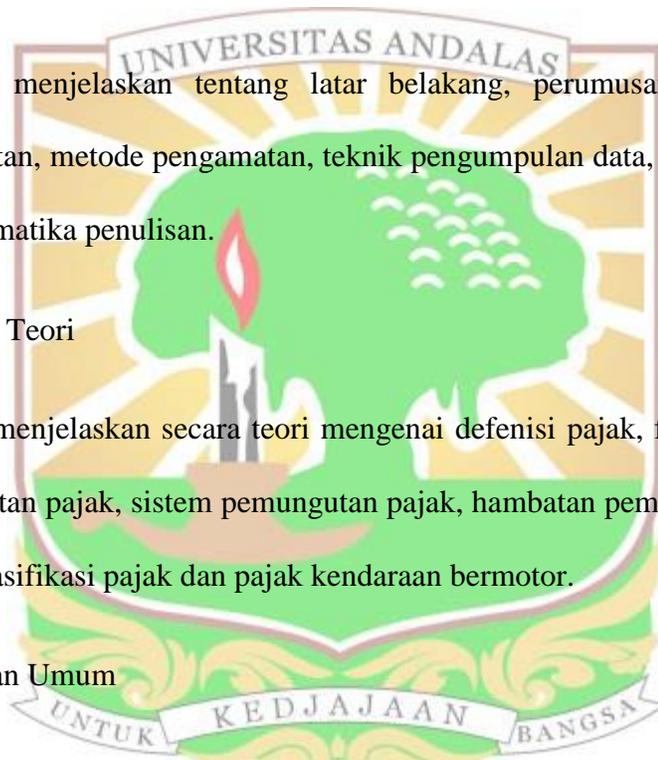
### BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan secara teori mengenai defenisi pajak, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, tarif pajak, klasifikasi pajak dan pajak kendaraan bermotor.

### BAB III Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang gambaran umum SAMSAT kota Padang, sejarah umum SAMSAT kota Padang, serta gambaran operasi dan struktur organisasi SAMSAT kota Padang.

### BAB IV Pembahasan



Bab ini merupakan inti dari penulisan, memuat pelayanan SAMSAT *Drive Thru* terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada SAMSAT kota Padang.

## BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat untuk dapat dipertimbangkan dalam rangka penerapan sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan SAMSAT *Drive Thru*.

